



**LAPORAN  
HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN SPESIFIK KOMISI II DPR-RI  
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018  
TANGGAL 23 JANUARI 2018**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota-anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja kelompok dalam masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR-RI.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Selatan 13 orang Anggota. Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, dan dari Bagian Pemberitaan DPR-RI serta utusan-utusan dari Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemilihan Umum.

**B. RUANG LINGKUP**

Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya, KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU/Panwaslu Kab./Kota di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Titik perhatian dari Komisi II DPR-RI dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan kali ini adalah untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni tahun 2018 antara lain berbagai permasalahan yang menjadi konsen maraknya politik uang,

maraknya penggunaan Isu-isu SARA yang menjadikan masyarakat terkotak-kotak dan terpecah-pecah serta penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab, ini menjadi bagian potensi kerawanan Pilkada yang harus diantisipasi sedini mungkin agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan secara aman, damai, luber dan jujur

## **II. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **A. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang menerima kunjungan dalam rangka melihat kesiapan jalan Pilkada Serentak 2018, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel. Pertemuan juga dihadiri Ketua KPU, Bawaslu, serta Panwaslu se-Sulsel. Di hadapan Komisi II DPR RI. Agus menjelaskan tiga hal. terkait persiapan pilkada serentak, anggaran pilkada, dan persiapan Pengamanan Pilkada. Untuk di Sulsel ada satu pilgub dan 12 pemilihan bupati dan wali kota, dan berharap masyarakat nantinya bisa menggunakan hak pilihnya. KPU sudah mensosialisasikan semuanya. Karena tolak ukur suksesnya pilkada, yaitu dengan terjaganya stabilitas. partisipasi pemilih tinggi. Sulsel sudah teruji dalam penyelenggaraan pilkada, pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres). Meski demikian, Pemerintah Provinsi meminta komitmen penyelenggara mulai dari KPU hingga tingkat bawah di KPPS memberi layanan terbaik baik.

Terkait permasalahan di lapangan, Pemprov Sulsel sudah berkoordinasi bupati dan walikota baik definitif atau pelaksana tugas karena ada yang maju pilkada, bisa mengawasi, dan berkoordinasi menghindari penyimpangan dan kesalahan jenis apapun.

Terkait anggaran, Pemprov Sulsel menyatakan semuanya sudah beres. Anggaran untuk KPU sebesar Rp 456 miliar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 141 miliar. dan Pengamanan TNI-Polri sebesar Rp 128 miliar. (untuk pengaman pilkada, polisi tentu sudah mengantisipasi semua).

## B. KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penjelasan KPU Sulsel, oleh Ketua KPU Muh Iqbal Latief. Terkait Sulsel yang masuk zona merah rawan konflik pilkada, Sulsel bukan zona merah yang bahaya atau merah pekat. “Merah sedang, semua masih bisa diantisipasi. Laporan Bawaslu semua masih terkendali. Memaparkan potensi kerawanan Pilkada di Sulsel. Menurut Ketua KPU Prov. Sulsel perhelatan Pilkada Jeneponto 2018 cukup seru, Pilkada Luwu masih dinamis, sedangkan Pilkada Enrekang hanya diikuti satu pasangan calon. Penjelasan secara tertulis terkait persiapan dan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Proses pencairan anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU dan 12 Kab/kota se Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan Pilkada sudah diselesaikan tepat waktu.
2. Secara garis besar, proses teknis yang telah sedang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - (i) Proses Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Proses ini telah berlangsung pada bulan November 30 Desember 2017. Penanda penting proses, setelah diterimanya penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi, serta dilakukannya penyebarluasan informasi tentang Hasil Analisis DP4 yang digunakan dalam Pemilihan.

Seiring dengan proses teknis pengolahan DP4 yang sebagian dilakukan ditingkat KPU RI, Koordinasi dan komunikasi dengan pihak berwenang dan para pihak pemangku kepentingan. Penyebarluasan informasi tentang data pemilih kepada para Camat dan Lurah/Kepala Desa dilakukan secara formal administrasi dan melalui forum pertemuan, dengan dukungan jajaran Pimpinan Pemerintah Daerah.

Proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Proses ”Pemutakhiran yang telah sedang berlangsung sejak tanggal 30 Desember 2017, terutama yang telah berlangsung terkait dengan

Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS. Proses ini disamping telah menghasilkan dokumen Daftar Pemilih yang telah dikonsolidasikan dengan data Desa/Kelurahan serta Jumlah TPS yang ada: juga telah diikuti dengan Bimbingan Teknis bagi para PPK dan PPS khusus terkait dengan Data dan Daftar Pemilih. Proses teknis penyusunan Daftar Pemilih ini ditandai dengan persiapan teknis rekrutmen Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).

Proses Pemutakhiran yang juga telah berlangsung, terutama berkaitan dengan Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP. Hasilnya yaitu telah dibentuk PPDP, dan telah dibekali dengan “ilmu” dan kemampuan etis dan teknis bagi para PPDP yang bersangkutan. Untuk perihal yang berkaitan dengan pencocokan dan penelitian (Coklit), maka pada tanggal 20 Januari 2018 yang lalu, telah sedang dilaksanakan. Proses Coklit ini akan berlangsung sampai dengan 18 Februari 2018. Pada tanggal 20 Januari 2018 (atau hari pertama proses teknis Coklit), telah dilakukan penganjuran Gerakan Coklit Serentak sebagai penanda proses pelaksanaan teknis pencocokan dan penelitian atas daftar pemilih.

Sampai saat ini, belum terdapat kendala yang berarti berkaitan dengan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan PPDP; hal ini lebih karena proses teknis di lapangan masih diawal proses. Meski demikian instrumen pemetaan kendala telah disiapkan, serta beberapa identifikasi kasus telah dibahas dan disimulasikan penyelesaiannya.

Untuk memastikan pemilih pemula terdata dalam daftar pemilih, termasuk yang belum memiliki E-KTP; KPU Kabupaten/Kota, telah melakukan sosialisasi berbasis sekolah/madrasah; dan mencatat dan/atau memasukan ke dalam Daftar Pemilih bagi pemilih pemula, berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, juga telah disediakan dan distribusikan ke setiap PPDP, formulir teknis yang akan digunakan

untuk mencatat pemilih pemula dan pemilih belum memiliki KTP-E. Proses pemutakhiran melalui Coklit secara faktual akan menjadi landasan yang menguatkan lebih lanjut. Untuk memastikan validitas daftar pemilih, terutama terkait dengan data pemilih ganda/pemilih fiktif; Aplikasi SIDALIH dioptimalkan dalam penyusunan Daftar Pemilih; melakukan rekonsiliasi data dengan DPT Pemilu Sebelumnya dan database kependudukan; serta secara teknis menjadiperhatian dalam proses Coklit oleh PPDP. Penggunaan aplikasi dan teknik rekon data silang, diharapkan mampu mengidentifikasi kegandaan dan ke-fiktif-an pemilih, baik ditingkat desa/kelurahan ataupun ditingkat kecamatan dan kabupaten. Identitas Pemilih berbasis NIK atau elemen data pokok yang relevan lainnya dan proses Coklit di lapangan, juga diharapkan mampu menguatkan mutu validitas. Disamping itu, juga telah disiapkan kerangka langkah publikasi atau pengumuman untuk mendapat tanggapan publik pada setiap fase daftar pemilih, serta telah disosialisasikan secara luas perihal terdaftar lebih dari 1 (satu) kali atau lebih dan perihal norma hukum yang relevan dengan pembentukan daftar pemilih, baik melalui media secara langsung maupun melalui kerja sama dengan para pihak. Partisipasi warga dan proses teknis pembentukan daftar pemilih yang baik, diharapkan dapat menjadi faktor pemasti bagi terbentuknya daftar pemilih dengan validitas yang tinggi dan memadai.

3. Masa pendaftaran yg dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dari tanggal 8 -10 Januari 2018 adalah tanggal 8 Januari 2018 tepat pukul 09.00 Wita bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Prof. Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan yang diusung oleh gabungan partai politik PDIP, PAN. dan PKS yang diterima langsung oleh 5 (lima) orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulsel. Pendaftar kedua dan dihari yang sama adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Bapak H. Nurdin Halid dan Bapak Aziz Qahhar Muzakkar tepat pada pukul 11.00 Wita yang diusung oleh gabungan partai politik Golkar,

Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI yang diterima langsung oleh 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Selatan. Pada hari ke 2 tepatnya hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 dibuka pendaftaran lagi mulai pukul 08.00 16.00 Wita. Namun pada hari itu. tidak ada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tidak ada datang untuk mendaftarkan diri. Pada tanggal 10 Januari 2018 yang merupakan hari terakhir pendaftaran dan tepat pada pukul 10.00 Wita Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ichsan Yasin Limpo dan Andi Muzakkar mendaftarkan diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melalui jalur perseorangan dan diterima oleh 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Namun selanjutnya pendaftar berikutnya adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan H. Agus Arifin Nu'mang dan Andi Tanri Bali Lamo yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Gerindra, PPP, dan PKB yang diterima langsung oleh 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Sampai dengan pukul 00.00 Wita Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menutup pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Ini berarti Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan hanya menerima 4 (empat.) kontestan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur & Sulawesi Selatan yang selanjutnya berkas pencalonan pasangan calon akan diteliti dan diverifikasi untuk kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.

4. Di Sulawesi Selatan ada 1 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal yaitu Kabupaten Enrekang. Namun telah dilakukan semua tahapan yang sesuai dengan PKPU sehingga tetap hanya ada 1 calon dalam pilkada tersebut.

5. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih berbagai model sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kab/Kota Se Sulawesi Selatan. Kegiatan Sosialisasi tersebut antara lain:
  - a. Launching Pilkada Serentak
  - b. Sosialisasi di Car Free Day
  - c. KPU Goes to Campus
  - d. Pembuatan dan pencetakan alat peraga sosialisasi
  - e. Iklan di Media Cetak, elektronik dan online
  - f. Melaksanakan Lomba Debat Pilkada untuk Pemilih Pemula secara berjenjang Coffee Morning dengan Stakeholder .
  - g. Gerak Jalan Santai
  - h. Gerakan stiker 1000 bentor
  - i. Pagelaran Musik Pilkada
  - j. Talkshow/Diskusi Publik
  - k. Apps Challenge
  - l. Pembentukan Relawan Demokrasi
  - m. Peningkatan Penggunaan Media Sosial
6. Dalam rangka mempersiapkan tahapan kampanye, KPU Sulsel akan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh KPU Kab/Kota dan juga dengan Tim Pasangan Calon untuk menetapkan Zona Kampanye serta penetapan jadwal kampanye masing-masing pasangan calon.
7. Dalam menjamin terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara yang berjalan secara jujur, adil dan demokratis adalah selain memberikan edukasi kepada para pemilih tentang bagaimana menggunakan hak suara dengan baik. Selain itu dilakukan pula penguatan terhadap kapasitas dan kompetensi Penyelenggara *Ad Hoc* terutama dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sehingga para penyelenggara *Ad Hoc* ini paham akan tugas pokok dan fungsinya serta mampu meminimalisir terjadinya masalah dalam kegiatan dimaksud.
8. Koordinasi dengan Bawaslu sebagai pengawas senantiasa berlangsung dengan baik dimana komunikasi dan koordinasi KPU Provinsi dengan Bawaslu Provinsi berjalan dengan baik. Sementara itu dengan pihak

kejaksanaan kerjasama dan koordinasi dilakukan antara lain melalui TP4D yang mendampingi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama yang bersifat administratif untuk memberikan pembinaan dan pengawasan sehingga proses tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pihak Kepolisian, dalam waktu dekat akan dilakukan MOU antara KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Polda Sulsel terkait pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan. MOU ini adalah kelanjutan dari kegiatan yang sama pada pemilihan terdahulu dimana Pihak Polda Sulsel memberikan dukungan yang maksimal terhadap KPU Sulsel dalam bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serentak di Sulsel.

9. Berdasarkan koordinasi KPU Sulsel dengan Polda Sulsel bahwa potensi kerawanan yang mungkin timbul terutama di wilayah yang termasuk daerah rawan konflik hal tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada Pihak Polda dengan tetap melakukan komunikasi secara berjenjang untuk meminimalisir timbulnya kerawanan.
10. Logistik Pilkada berupa Kotak dan Bilik Suara di Sulawesi Selatan masih mencukupi sehingga tidak dilakukan pengadaan, sementara untuk Surat Suara masih menunggu dari LKPP dan KPU RI guna proses Lelang e-Katalog.
11. Data Jumlah Penyelenggara dan TPS se Sulawesi Selatan



NO	KABUPATEN	KODE WILAYAH	JUMLAH				JUMLAH DP4		
			KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	PPDP	LK	PR	TOTAL
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kabupaten Bantaeng	73.03	8	67	357	511	71,882	75,015	146,897
2	Kabupaten Barru	73.11	7	55	423	468	60,642	66,617	127,259
3	Kabupaten Bone	73.08	27	372	1,532	2,271	304,589	331,721	636,310
4	Kabupaten Bulukumba	73.02	10	136	761	1,201	159,549	161,419	320,968
5	Kabupaten Enrekang	73.16	12	129	490	490	86,417	83,419	169,836
6	Kabupaten Gowa	73.06	18	167	1,170	1,432	260,874	273,981	534,855
7	Kabupaten Jeneponto	73.04	11	113	636	636	144,155	152,349	296,504
8	Kabupaten Kepulauan Selayar	73.01	11	88	297	376	45,979	50,352	96,331
9	Kabupaten Luwu	73.17	22	227	925	1,114	131,026	131,421	262,447
10	Kabupaten Luwu Timur	73.24	11	127	437	453	103,456	98,076	201,532
11	Kabupaten Luwu Utara	73.22	12	173	624	700	130,982	129,149	260,131
12	Kabupaten Maros	73.09	14	103	680	680	135,798	144,453	280,251
13	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	73.10	13	103	649	649	123,343	132,151	255,494
14	Kabupaten Pinrang	73.15	12	108	723	823	143,017	151,849	294,866
15	Kabupaten Sidenreng Rappang	73.14	11	106	598	829	108,252	114,315	222,567
16	Kabupaten Sinjai	73.07	9	80	540	540	89,121	90,961	180,082
17	Kabupaten Soppeng	73.12	8	70	513	513	88,871	98,943	187,814
18	Kabupaten Takalar	73.05	9	100	351	351	97,444	106,744	204,188
19	Kabupaten Tana Toraja	73.18	19	159	566	566	103,156	97,325	200,481
20	Kabupaten Toraja Utara	73.26	21	151	581	626	80,551	79,548	160,099
21	Kabupaten Wajo	73.13	14	190	902	1,247	167,721	181,676	349,397
22	Kota Makassar	73.71	15	153	2,670	3,749	605,298	623,664	1,228,962
23	Kota Palopo	73.73	9	48	375	421	63,406	65,794	129,200
24	Kota Parepare	73.72	4	22	300	335	62,101	64,410	126,511
TOTAL			307	3,047	17,100	20,981	3,367,630	3,505,352	6,872,982

### C. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Provinsi sebesar Rp 141. 9 Milyar dan proses pancairan tahun 2017 berjalan lancar. Dan untuk Panwaslu di 12 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan Pilkada sebesar Rp 102.3 Milyar sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp 2442 Milyar. Untuk kebutuhan 2017 sudah dicairkan tepat waktu.
2. Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan untuk seluruh proses melakukan pencegahan dan pengawasan terkait :
  - a. Telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memastikan pengawasan pemutakhiran data pemilih yang dapat menghasilkan data pemilih yang valid dan bebas mobilisasi pemilih dari petahana;

- b. Telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memastikan pengawasan pendaftaran dan penetapan pasangan calon GubernurNVakil Gubernur, BupatiNVakil Bupati, WalikotaNVakrl Walikota berjalan sesuai prosedur dan mekanisme.
  - c. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota telah menyurati Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta instanSi vertikal sebagai upaya pencegahan netralitas ASN. TNI dan POLRI. Selain itu, Bawaslu Provmsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan sosralisasi tatap muka dengan mengundang pimpinan SKPD.
  - d. Bawaslu dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pengawas partisipatif dengan sasaran; partrsipasr pemilih, partisipasi mengawasi dan partisipasi melaporkan;
  - e. Telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memastikan pengawasan kampanye pilkada yang adil dan tidak memihak petahana termasuk pemasangan atribut kampanye;
  - f. Menjamin pemungutan dan perhitungan suara berjalan secara jujur adil dan demokratis dengan membentuk Pengawas TPS.
3. Bawaslu Provinsi telah melakukan sosialisasi dalam bentuk persuratan dan pertemuan tatap muka dengan bakal pasangan calon bersama tim hukumnya sebagai langkah pencegahan. Bawaslu juga secara internal memberikan Bimtek kepada staf Bawaslu Provinsi. anggota serta staf Panwas Kabupaten/Kota mengenai pengawasan politik uang dan penanganan laporan/temuan sesuai dengan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk memberikan sanksi administrasi pembatalan pasangan calon sesuai dengan Pasal 73 dan Pasal 135A UU No. 10 tahun 2016.
  4. Kesiapan personil pengawas pada Kabuypaten/Kota,Kecamatan dan PPL sebanyak 10.137 orang dan sudah dibimtek, sebulan sebelum hari pencoblosan akan dibentuk 17.100 Pengawas TPS.
  5. Sentra Gakkumdu Provinsi dan di 24 Kabupaten/Kota sudah terbentuk dan telah melakukan Rakor dan Bimtek penanganan pelanggaran.

6. Bawaslu/Panwaslu se-Sulawesi Selatan melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk persuratan kepada bakal pasangan calon serta tim kampanye, sosialisasi tatap muka sebagai upaya pencegahan terhadap Kampanye Hitam, Isu SARA, dan Politik Uang.
7. Hasil pemetaan Kepolisian dan BIN Sulsel masuk zona merah dan IKP Bawaslu, Sulsel masuk rawan sedang. Namun dari hasil pemetaan tersebut menjadi acuan dalam kegiatan pencegahan khususnya pada daerah-daerah yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi seperti Kabupaten Gowa, Kota Palopo, dan Kabupaten Bone.

#### **D. KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1. Kesiapan keamanan pilkada serentak tahun 2018, sudah ada surat perintah pelaksanaan pengamanan, sebagai awal pengamanan termasuk membagi kekuatan-keuatan sesuai dengan tahapan-tahapan pemilukada pada Polres di 12 kab./kota.
2. Tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan KPU, membuat pengamanan setiap tahapan dan sudah memetakan kerawanan konflik pada setiap daerah
3. Sampai dengan terakhir, kerawanan di Bone, pasangan calon perseorangan, Daerah Sidrap dan Luwuk sudah terjadi kejadian-kejadian pada saat penetapan pasangan calon, Netralitas penyelenggara, diwaspadai, potensi ancaman, situasi nasional harga beras yang dipolitisir, sehingga jualan data pilkada di Sulsel, masalah terjadi friksi antara partai Hanura
4. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan baik preemptive, preventif, membentuk satgas money politik dan satgas cyber, pada saat pasangan calon yang alih memberikan mahar termasuk cyber, dan medsos, juga patroli, menangkal ujaran-ujaran kebencian,

5. Kegiatan-kegiatan lain, sudah melakukan kegiatan 3 (tiga) hari yang lalu, yaitu Gakkumdu, mengajak kejaksaan negeri, untuk melaksanakan rapat koordinasi di Polda sudah terbentuk di jajaran sampai dengan tingkat kab. Kota
6. Anggaran Polda untuk pengamanan pilkada pada tanggal 12 Januari 2018 sudah ditandatangani NPHD, yang diberikan Pemprov Sulsel kepada pihak Polda, sejumlah 128 milyar sudah termasuk 18 milyar untuk TNI untuk pengamanan pilkada
7. Posko-posko sudah tersebar diseluruh jajaran tidak ada hal-hal atau kejadian yang menonjol, sampai sekarang masih bisa teratasi kerjasama dengan Pemda dan penyelenggara pilkada
8. Kegiatan 3 (tiga) hari yang lalu, Rabu Kamis Jumat, melaksanakan pelatihan operasi pengamanan 160 personil untuk pengamanan pasangan calon yang telah ditetapkan tersebut
9. Pilkada kota dan jajaran sudah melakukan latihan pra operasi termasuk latihan-latihan dalmas, dan juga latihan-latihan di TPS dengan simulasi-simulasi
10. Untuk memperkuat cadangan sudah menentukan rayon-rayon, Polres-Polres berkonsentrasi untuk mengamankan pilkada-pilkada di wilayah masing-masing
11. Ada perintah Mabes Polri untuk mengajak rekan-rekan TNI untuk membackup Polri untuk keamanan pilkada, sudah menandatangani MOU kerjasama antara TNI dan Polri untuk bantuan pengamanan, akan bersama-sama untuk pengamanan pilkada di Provinsi Sulsel.

#### **E. KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1. Gambaran kesiapan Sentra Gakkumdu periode 2017 kemarin di lingkungan kejaksaan tinggi sudah membentuk posko di 24 kab dan kota dan 9 kajari, dari seluruh persiapan yang ada memberikan dukungan penuh rekan-rekan yaitu para jaksa yang akan menangani

pelanggaran kedepan, hukum acara delik pilkada waktunya sangat sedikit, persiapan dan kelengkapan formil harus secepat dari awal, Kapolda sudah membentuk dan membuat rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Gakkumdu, yang menyepakati pola penyelesaian perkara agar lebih cepat dan tepat waktu.

2. Sudah membentuk posko kerawanan politik uang, di Kejaksaan sudah membentuk posko yang sama, di daerah sudah membentuk tim yang khusus untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan terkait ASN dan sebagainya.

### III. Kunjungan Lapangan (On the spot) di Kantor KPU dan Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan lapangan di Kantor KPU dan Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemaparan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang didampingi Panwaslu Kab./Kota se Sulawesi Selatan, menjelaskan beberapa persoalan Pertama, mengenai Netralitas ASN pengawasan ini juga juga didukung oleh laporan masyarakat Sulsel yang sangat kritis, diskusi mengenai materi langkah-langkah pencegahan yang suratnya sudah dilayangkan dari Bawaslu Provinsi kepada seluruh instansi terkait, beberapa temuan/laporan terkait netralitas ASN antara lain tiga pejabat terkait netralitas ASN di Kota Makassar, di Bantaeng, 12 orang di Pare-Pare, di Kab Gowa menunggu dan sudah tindaklanjuti dengan pihak terkait, foto yang memuat sejumlah ASN yang menggunakan simbol dari salah satu pasangan calon, ada 22 nama yang dilaporkan di Kab. Gowa, serta laporan terkait 8 (delapan) orang guru besar, terlibat kegiatan bernuansa politik praktis, dukungan salah satu pasangan calon Nurdin Halid, sudah dilakukan kajian, ada lembaga yang tidak berbadan hukum, mengundang sejumlah guru besar, tema untuk mengkaji visi misi salah satu pasangan calon, lembaga dan pembiayaan tidak jelas (dua hotel panitia yang mencari pembiayaan) diperkuat dengan gambar-gambar iklan di koran, ada yang mengakui dan ada yang hanya sebentar dalam pertemuan kemudian pulang, dari hasil kajian itu dilaporkan ke Komisi ASN, Kedua mengenai Kantor

Bawaslu Provinsi masih status pinjam pakai, belum diserahkan sepenuhnya oleh Pemprov dan belum dimanfaatkan semaksimal mungkin, fasilitas kurang memadai (dokumen pilkada yang akan datang akan dilakukan penyimpanan dimana, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dokumen) dengan keterbatasan kantor yang sekarang saja sudah sempit/penuh dengan dus-dus dokumentasi pemilu, Ketiga mengenai antisipasi pengawasan politik uang yang merupakan kampanye sentral Bawaslu Provinsi khusus di Bulan Suci Ramadhan, Bawaslu sudah bekerjasama dan melibatkan dengan para Dai sehingga bisa menjelaskan mengenai sogok menyogok/Politik uang, mengenai sedekah politik dan sedekah murni (tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tau/memberi tetapi tidak ada embel-embel) termasuk bentuk sembako syariah menyumbang tetapi tidak ada kepentingan dibalik sumbangan, pengalaman laporan masyarakat selama ini begitu melapor maka akan dikawal terus di Bawaslu bahkan rela menginap di kantor Bawaslu sampai pengadilan, sehingga Bawaslu Provinsi Sulsel memiliki standar jika ada tamu tidak boleh diterima sendiri oleh Komisioner tetapi didampingi staf, diterima secara terbuka dan pintu terbuka.

Pemaparan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang di dampingi anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta KPU Kab./Kota se Sulawesi Selatan menjelaskan beberapa persoalan yang dihadapi KPU Sulsel saat ini. Pertama, dari 24 KPU kabupaten / kota, baru 17 KPU memiliki kantor permanen, tujuh di antaranya, termasuk Kantor KPU Sulsel itu masih pinjam pakai dari pemerintah. Kedua terkait pergantian komisioner KPU di delapan kabupaten/kota jelang pilkada Serentak 2018 dan KPU Sulsel. Menurutnya, pemilihan anggota KPU Sulsel periode 2015-2023, apalagi menjelang Pilkada Serentak di 12 kabupaten/kota termasuk Pilgub bakal berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masa jabatan KPU Provinsi sampai tanggal 24 Mei (2018), sebulan sebelum pencoblosan. Seleksi KPU di Sulsel dinamikanya begitu tinggi, terpilih pun masih digoyang-goyang, sehingga Komisi II DPR-RI menekankan kepada KPU Provinsi dan seluruh jajaran untuk tidak melakukan penyimpangan dalam proses penggantian jabatan komisioner.

Komisi II DPR RI akan membantu penuh Bawaslu dan KPU Sulsel terkait tugas dan kewenangan yang diberikan dalam Undang-undang Pemilu. Ada tiga posisi rawan, pertama keberpihakan penyelenggara (KPU dan bawaslu), politik uang dan data pemilih yang tidak akurat. Terkait pinjam pakai kantor KPU dan Bawaslu, Komisi II DPR RI menyarankan KPU dan Bawaslu Provinsi Sulsel untuk menyurat ke gubernur meminta proses hibah, tembusan ke komisi II DPR RI untuk dikawal di Mendagri.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Lapangan Spesifik Komisi II DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.